

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA WANCIMEKAR MENUJU KONSEP SMART VILLAGE

Naufa Alifah¹, Nurul Izzati², Dewi Noor Azijah³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: 2110631180105@student.unsika.ac.id¹, 2110631180108@student.unsika.ac.id²,
dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 5 – Juni - 2023

Received in revised form : 5 – Desember - 2023

Accepted : 21 – Februari - 2024

Available online : 1 – Maret - 2024

ABSTRACT

The concept of Smart Village or smart village is a process of adjustment and development experienced by people in rural areas so that they can generate benefits and balance between information technology and villagers so that they can solve problems in the area by using the potential of existing resources that are owned intelligently. Three important elements in a Smart Village that influence one another consist of smart government, smart environment and smart economy. Wancimekar Village in Karawang Regency is seen as one of the villages that is still going through developments towards a smart village, where the obstacle factors will be reviewed through the three elements of the Smart Village concept. This study intends to understand how big the development process of Wancimekar Village is towards a Smart Village. The method used is qualitative narrative with data collection techniques carried out through interviews, direct observation and documentation by related parties and conducting literature studies. The results of this study indicate that the village of Wancimekar is ready to move towards the smart village concept because it is supported by adequate resources. In the aspect of digitizing village services, this is already in the digital development stage, namely by establishing an official digital service page, although it is still in the development stage. The results of this study indicate that the village of Wancimekar is ready to move towards the smart village concept because it is supported by adequate resources. In the aspect of digitizing village services, this is already in the digital development stage, namely by establishing an official digital service page, although it is still in the development stage. The results of this study indicate that Wancimekar village is ready to move towards the smart village concept because it is supported by adequate resources. In the aspect of digitizing village services, this is already in the digital development stage, namely by establishing an official digital service page, although it is still in the development stage.

Keywords: Digitalization, Wanci Mekar Village Government, Smart Villag

1. PENDAHULUAN

Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia yang dimulai dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang berfokus membangun infrastruktur untuk memajukan wilayah baik perkotaan maupun pelosok desa terkecil yang ada di Indonesia. Begitu juga pembangunan baik infrastruktur maupun pemerintahan desa yang sedang gencar diinstruksikan oleh pemerintah dengan adanya program dan kebijakan digitalisasi pelayanan maupun dengan digagasnya konsep Desa Pintar (Smart Village).

Seperti yang sudah dinyatakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 tentang Desa bahwa "Desa yang mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama". Dalam tujuan untuk mengembangkan desa, telah ada konsep yang sebelumnya sudah dianut oleh kota besar yang disebut *smart city* yang dimana mencakup dari 3 bidang antara lain: kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi.

Pemanfaatan teknologi dan informasi di pedesaan perlu dikembangkan mengingat besarnya peran desa dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Gagasan desa pintar atau smart village dapat digunakan untuk mengembangkan daerah pedesaan melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Akses listrik menjadi katalis untuk membangun dan meningkatkan berbagai hasil pembangunan dalam konsep "desa pintar". Teknologi dapat meningkatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan ketahanan ekonomi dengan cepat jika digunakan secara efektif. Akibatnya, desa bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai fasilitas perkotaan sambil mempertahankan kesadaran akan keunggulan pedesaan dan mencapai pembangunan nasional yang seimbang (Holmes).

Para ahli mendefinisikan "desa pintar" sebagai masyarakat desa yang telah mengalami integrasi dan pertumbuhan guna memberikan manfaat dan kesinambungan antara desa dengan teknologi informasi. Desa cerdas adalah suatu konsep yang menekankan bagaimana masyarakat desa dalam suatu komunitas dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, arif, dan berdaya guna serta menjunjung tinggi adat istiadat, adat budaya setempat, dan norma-norma yang berlaku. (Baru, Djunaedi, & Herwangi, 2019).

Salah satu variabel dan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi pemerintahan desa adalah konsep desa cerdas. Perkembangan kawasan desa tidak mungkin dapat dibandingkan dengan lingkup perkotaan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi karena kekhasan kawasan desa, budaya, dan masyarakatnya. Agar desa dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan nilai, karakter, dan norma desa, perlu ada konstruksi konseptual dasar tentang karakteristik wilayah desa ketika menerapkan informasi dan teknologi komunikasi (Herdiana 2019).

Agar konsep desa pintar berpeluang berhasil dilaksanakan, maka harus memiliki beberapa unsur pendukung. Pemerintah, masyarakat umum, dan lingkungan pedesaan adalah tiga komponen dan elemen dasar, dan masing-masing dari ketiganya memainkan peran unik dalam masyarakat. Tiga komponen "Smart village", yang terdiri dari "Smart government", "Smart Environment", dan "Smart Economy", bergabung membentuk satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Smart Government adalah suatu pengembangan dari e-government yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Smart government dapat diidentifikasi dengan: 1. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; 2. Aksesibilitas ke pelayanan publik dan sosial; dan 3. Transparansi dalam pemerintahan. Koordinasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk forum dan musyawarah, disebut sebagai keterlibatan masyarakat. Kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan pengaduan, khususnya yang tersedia secara online, merupakan definisi lain dari ketersediaan pelayanan publik. Pengertian transparansi tata kelola berkaitan dengan bentuk media yang tersedia sehingga masyarakat umum dapat mengakses informasi dan membuka cara untuk merumuskan

program dan kebijakan. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahannya untuk mencapai transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik, dan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka smart government dapat dimaknai hampir identik dengan implementasi *e-government* atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Smart Community adalah sebuah konsep untuk pertumbuhan lokasi yang mengintegrasikan infrastruktur dan sistem untuk teknologi berbasis mobile internet. Kemajuan masyarakat dan kebutuhan infrastruktur teknologi berjalan beriringan. Masyarakat memiliki peran penting dalam konsep desa cerdas karena tidak hanya sebagai objek pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga memiliki keinginan dan niat untuk mengarahkan jalannya kehidupan desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Smart Economy atau yang dimaksud dengan “ekonomi cerdas” adalah pengembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan penyerapan tenaga kerja pada industri unggulan, penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan budaya berbasis sumber daya lokal. Menurut Giffinger dan Haindl (2007), smart economy ditandai dengan meningkatnya daya saing dan munculnya penemuan-penemuan baru dalam usaha ekonomi rakyat. Menurut Bobek (2015), Pondasi ekonomi cerdas adalah semangat penemuan, kewirausahaan, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan keterhubungan global. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa inovasi, promosi, dan peningkatan daya saing akan menghasilkan perekonomian desa yang stabil. Gagasan ekonomi cerdas lebih cocok untuk BUMDes untuk mendukung ekonomi pedesaan lokal. BUMDes didirikan di desa sebagai badan usaha yang dimiliki bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat (bersifat komunal), agar lebih mencerminkan unsur kebersamaan dalam mengelola suatu usaha. Kehidupan masyarakat di pedesaan biasanya bercirikan budaya, gotong royong, persaudaraan, rasa sosial yang tinggi, dan tidak hanya mencari keuntungan. Akibatnya, BUMDes dapat dilihat sebagai lembaga ekonomi alternatif yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Desa Wancimekar merupakan salah satu contoh bagaimana implementasi dan perkembangan *Smart village* di Kabupaten Karawang. Hal ini dibuktikan berdasarkan data mentah yang didapat, dinyatakan bahwa akses internet, kesiapan pemerintah dan infrastruktur di desa ini belum cukup memadai untuk dicapainya *Smart Village*. Alasan lain yang menjadikan pertimbangan Desa Wancimekar sebagai tempat penelitian adalah penulis melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan namun di dalam lapangan terdapat banyak hambatan. Meskipun Desa ini dekat dengan jantung Kota Cikampek, namun proses digitalisasi antara pelayanan dari pihak perangkat desa dan pemahaman masyarakatnya masih kurang. Maka dari itu, berbagai hambatan yang dihadapi oleh Desa Wancimekar dalam mewujudkan Desa Pintar atau Smart Village ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana perkembangan Desa Wancimekar menuju Konsep Smart Village. Sehingga dapat diketahui apa saja kekurangan serta potensi yang dimiliki desa Wancimekar agar dapat mengoptimalkan serta mewujudkan desa pintar yang didalamnya berisi pemerintahan yang cakap digital, lingkungan yang maju, serta ekonomi yang berkembang melalui digitalisasi.

1. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. *Smart Government*

Atau pemerintah yang cerdas adalah dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Dengan adanya ini akan membuat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari konsep ini kemudian untuk mengintegrasikan TIK ke dalam semua fungsi pemerintah, yaitu. manajemen, pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Indikator manajemen cerdas adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses ke layanan publik, sosial, dan keterbukaan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah untuk mengarahkan dan berkoordinasi dengan masyarakat,

termasuk partisipasi masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Ketersediaan layanan public dan sosial mengacu pada ketersediaan layanan publik dan penggunaan pengaduan publik dalam jaringan negara. Keterbukaan menggambarkan jenis media yang tersedia bagi publik untuk memperoleh informasi dan mekanisme keterbukaan program perencanaan.

1.2. Konsep *Smart Village*

Desa cerdas adalah layanan yang menggunakan teknologi informasi secara ampuh dan berdaya guna untuk kegiatan desa yang dipimpin oleh warga desa. Desa cerdas adalah peningkatan konsep dimana penduduk desa berada dalam komunitas yang memecahkan masalah daerah dengan menggunakan kemampuan sumber daya secara cerdas, bijaksana dan efektif serta mengangkat adat dan budaya setempat serta standar yang dapat digunakan.

Dalam pelaksanaannya, konsep desa pintar harus memiliki beberapa komponen pendukung agar pengamalannya dapat berdampak baik. Ketiga faktor dan unsur utama tersebut adalah pemerintah, masyarakat dan lingkungan desa, dengan masing-masing unsur di atas memiliki kapasitas dan kewajiban yang berbeda. Ketiga unsur tersebut, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart economy*.

1.3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa mempunyai arti lembaga negara yang berkonsekuen atas pengendalian wilayah desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih dengan hak pilih universal yang bertanggung jawab atas pembangunan, kepemimpinan dan penguatan warga desa. Kewajiban badan desa antara lain menyusun rencana pembangunan desa, melaksanakan kebijakan badan desa, mengelola keuangan desa, pelayanan umum, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan di wilayah desa. Badan Desa juga memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan keputusan terkait persoalan yang dihadapi warga desa.

Pemerintah desa juga berkolaborasi dengan lembaga tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam menyusun program pembangunan dan pembangunan warga desa. Selain itu, kepala desa juga berkedudukan menjaga ketentraman dan keamanan desa serta menegakkan hak-hak warga desa. Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga desa, sehingga diperlukan kepala desa yang kompeten yang memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan kapasitas desa dan meningkatkan kesejahteraan warga yang ada di desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat naratif, yang mengikutsertakan komunikasi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan berdiskusi untuk memperoleh data informasi yang diinginkan. Setelah data informasi terkumpul, peneliti lalu mengolahnya dan menarik kesimpulan secara jelas.

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui empat cara, yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan agar memperoleh gambaran yang jelas dan rinci yang terpaut dalam objek penelitian. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan perangkat desa yang berkompeten dalam bidangnya yang ada di desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesiapan Pemerintah Desa Wancimekar Dalam Rencana Pengembangan Program *Smart Village*

Konsep *smart village* digunakan untuk mengintegrasikan teknologi informasi bagi kehidupan masyarakat yang ada di desa, menciptakan manfaat dan kelangsungan pada warga yang ada di desa. Pada awal pengembangan *smart village*, hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu ialah bagaimana keadaan desa tersebut menurut demografi penduduk, karena untuk menggambarkan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap *smart village*. Proses pembangunan *smart village* membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai nilai, entitas, dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat diposisikan

sebagai pelanggan teknologi informasi. Masyarakat diprioritaskan sesuai dengan kemampuan dan budi pekerti yang ingin ditingkatkan dan distrukturkan dengan dukungan sarana yang ada untuk mewujudkan dalam desa cerdas penggunaan sarana yang berguna sesuai kebutuhan dan watak masyarakat.

Setiap pemerintah desa di Indonesia tentunya sudah seharusnya siap dalam mewujudkan konsep *smart village*. Terlebih dengan adanya *smart village* yang dapat membantu sebuah desa menjadi lebih terarah, serta bukan hanya dalam hal kecanggihan teknologi tetapi juga membantu perubahan sebuah desa menjadi lebih maju, berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki di desa sesuai dengan sebagaimana semestinya. Desa Wancimekar sendiri dinilai sudah siap menuju konsep *smart village* karena sesuai dengan visi misi kepala desa yaitu untuk membangun desa. Selain itu, potensi yang fisik yang dimiliki desa Wancimekar sudah sangat memadai seperti, adanya pembangunan infrastruktur yang dibuat untuk kenyamanan masyarakat, diantaranya adalah perbaikan saluran drainase, akses jalan utama, fasilitas tempat olahraga, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Selain dari potensi fisik desa, desa Wancimekar sudah mengembangkan kemajuan desa melalui pola pikir yaitu ketertarikan masyarakat mengenai apa yang ingin dibangun, jadi membuat masyarakat tertarik untuk ikut serta membangun desa. Sementara, dari segi pemerintah desanya sendiri sudah melaksanakan sosialisasi program pemerintah atau program apa yang akan dilaksanakan desa kepada masyarakat setempat. Pemerintah desa juga telah melakukan edukasi untuk setiap pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung oleh kepala desa untuk membentuk pola pikir masyarakat desa Wancimekar. Namun, akses digital yang ada di desa ini masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan konsep *smart village* ada tiga elemen penting dalam mewujudkan *smart village* yaitu pertama *smart government*, di desa Wancimekar sendiri itu sudah melaksanakan *smart government* dengan baik, ditandai dengan masyarakat yang sudah ikut serta langsung dalam mengambil keputusan yang dilakukan di desa, masyarakat desa Wancimekar setiap satu bulan sekali bersama perangkat desa dan kepala desa melakukan musyawarah desa yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa program-program yang dilakukan oleh desa serta berbagai informasi penting lainnya sekaligus perangkat desa menjabarkan transparansi mengenai keuangan desa secara rinci. Lalu pelayanan publik di kantor desa sudah memenuhi standar yang dibuktikan oleh perangkat desa sudah menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mengurus administrasi yang dibutuhkannya. Dalam bidang pelayanan berbasis elektronik desa ini masih dalam tahap pengembangan website dan laman resmi desa maupun fitur-fitur pelayanan yang ada di dalamnya, sehingga di desa ini belum terdapat pelayanan berbasis elektronik.

Smart Community yang ada di desa Wancimekar masih belum mendukung dimana sebagian masyarakatnya mudah terprovokasi akan berita hoax yang menyebar di media, sedangkan perangkat desa sudah banyak melakukan program sosialisasi dalam menanggapi berita hoax, Contohnya pada masa pandemi covid-19 masyarakat begitu percaya berita hoax mengenai vaksin yang akan diberikan sehingga masyarakat banyak yang menolak pada saat akan diberikan vaksinasi. Masyarakat yang ada di desa Wancimekar juga belum menerapkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan dan bidang lainnya. Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai kesempatan untuk mengoptimalkan partisipasi dan kontribusi mereka pembangunan desa. Teknologi informasi ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kapasitas masyarakat yang perlu berpartisipasi pembangunan desa. Akibatnya, sikap masyarakat terbuka dan reseptif Teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pribadi dan terkait dengan sosial dan pemerintahan desa. Masyarakat tidak seperti itu untuk memanfaatkan kehadiran teknologi informasi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas Masyarakat mendapat manfaat dari penggunaan teknologi informasi konteks sosial dan administrasi di desa

Smart economy di desa Wancimekar di dukung dengan adanya UMKM yang sedang berjalan, UMKM yang ada di desa ini ada yang berkelompok dan ada juga yang sendiri atau secara individu. Namun sayangnya belum ada UMKM yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Tetapi pemerintah desa sudah memfasilitasi masyarakat untuk pengajuan program-program yang ada di Kabupaten maupun yang melalui aspirasi-aspirasi dewan desa Wancimekar selalu siap membantu. Contoh kegiatannya yang sudah ada yaitu

para pelaku usaha kecil di desa Wancimekar yang ingin mengajukan proposal untuk pelaku usaha Bersama sudah difasilitasi dengan baik. Pada awal tahun 2023 pemerintah desa Wancimekar memiliki rencana untuk alokasi dana terhadap pengembangan UMKM yang ada di desa baik dari segi pelatihan dan lain-lain.

Dari segi infrastruktur setiap tahun desa ini mengalami kemajuan. Karena setiap tahun selalu ada alokasi dana untuk membangun infrastruktur baik dalam bentuk pembangunan jalan ataupun pembangunan posyandu yang berbentuk fisik. Namun alokasi dana tahun kemarin hanya bisa digunakan untuk 4 titik kegiatan karena dari pemerintah pusat alokasi dana untuk BLT. Di desa terdapat Pagu anggaran yang artinya presentasi-persentase anggaran itu harus dikemakan yang tergantung perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Infrastruktur yang dikelola desa telah dirasakan oleh banyak masyarakat desa Wancimekar, walaupun masih ada beberapa infrastruktur yang belum selesai seperti jalan lingkungan. Jika infrastruktur desa yang dikelola oleh kabupaten dan belum maksimal hanyalah ada di jalan poros yang ada di dusun Krajan. Pada tahun 2024 desa Wancimekar di gadang-gadang akan diberikan alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan penerangan jalan umum.

Penerapan Konsep *Smart Village* Melalui Digitalisasi Pelayanan di Desa Wancimekar

Dengan memberikan pelayanannya kepada masyarakat, desa harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas dan transparan serta akuntabel dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pengelolaan desa bagi masyarakat, sehingga digitalisasi pelayanan desa dipandang sangat perlu untuk menjadikan desa yang transparan dan akuntabel serta melayani masyarakat secara efektif dan efisien.

Saat ini di Desa Wancimekar belum ada pelayanan berbasis digitalisasi berupa Aplikasi maupun laman resmi (website) baik berisi profil desa maupun pilihan layanan berdasarkan digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Perangkat desa Wancimekar menilai, aplikasi buatan desa yang akan digunakan untuk melakukan pelayanan berbasis digital masih dalam tahap pengembangan di dalam pembuatannya. Dimana nanti di dalam aplikasi maupun laman resmi tersebut berisi layanan untuk kebutuhan desa, data-data desa, serta fitur pelayanan masyarakat maupun surat menyurat pemerintahan desa. Laman resmi tersebut masih dalam tahap pengembangan karena masih dalam proses menginput data-data masyarakat ke dalam laman resmi tersebut, hal ini terjadi akibat kurang maksimalnya desa Wancimekar untuk mengumpulkan data karena alasan memiliki banyak Rukun Tetangga dengan jumlah 54 unit, sementara data yang telah tercatat ke dalam sistem data laman resmi tersebut hanya sekitar 2 sampai 3 RT. Di dalam proses pembuatannya, desa Wancimekar telah melakukan riset dan melakukan pendekatan komunikasi dengan desa tetangga yang sudah lebih dahulu mengembangkan Pelayanan Desa berbasis internet maupun digital sejak tahun 2016. Desa Wancimekar sendiri baru seumur jagung untuk memulai pembuatan konsep aplikasi atau laman resmi ini, yaitu pertengahan tahun 2022. Dalam perkembangannya, Perangkat Desa Wancimekar pun masih mempelajari dengan teliti dari segi keamanan demi menghindari kebocoran data. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, desa Wancimekar sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pelayanan melalui digitalisasi dan internet, demi mewujudkan pelayanan yang cakap akan teknologi di bidang komunikasi. Pemerintah desa juga sudah mengedukasi masyarakat terkait tugas-tugas perangkat desa yang dimana masyarakat akan tahu divisi-divisi yang ada di perangkat desa.

Pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ada di desa ini dirasa belum efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena PADes atau pendapatan asli desa di desa Wancimekar masih belum optimal dengan kata lain pendapatan aslinya masih sedikit, karena pemanfaatan ekonominya masih belum bisa digali lebih dalam dari perangkat desanya. Desa wancimekar sendiri sebenarnya memiliki BUMDes yang baru dibentuk pada tahun 2022. Namun pemerintah desa Wancimekar semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat dalam segi ekonomi agar bisa berkembang. Walaupun masih dalam tahap pengembangan desa ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan melalui digitalisasi dan internet.

Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesiapan Pemerintah Desa Wancimekar Dalam Rencana Pengembangan Program *Smart Village*

Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa, salah satunya yang dikatakan oleh informan adalah faktor pola pikir masyarakat yang terkadang sulit untuk berkontribusi membangun smart village. Walaupun tidak semua masyarakat, masyarakat masih sulit untuk membedakan mana informasi yang membangun dan mana informasi yang provokatif. Sebagai contoh yang terjadi di desa Wancimekar yaitu pada saat vaksin Covid-19, masyarakat di desa Wancimekar masih ada yang menolak. Lalu pelayanan pajak yang ada di desa menjadi sulit akibat adanya berita-berita provokatif yang masyarakat terima karena ada berita yang sedang hangat diperbincangkan di media. Pajak bagi desa sangat penting, karena jika pajak meningkat maka alokasi dana untuk pembangunan akan meningkat juga. Contohnya ADD alokasi dana desa, DBH dana bagi hasil yang bersumber dari pajak. Ketika pajaknya tercapai 100% otomatis alokasi dana yang diterima oleh desa akan meningkat yang akan berpengaruh baik untuk infrastruktur maupun kegiatan non fisik. Dan dana DBH akan digunakan untuk pembangunan jalan dan lingkungan.

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi kesiapan dalam pengembangan smart village yaitu transparansi keuangan dana desa dan kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Semua desa dituntut untuk melakukan transparansi keuangan dana desa. Desa Wancimekar sendiri sudah melakukan transparansi dana desa dengan menggunakan banner ataupun alat peraga informasi yang dibuat setiap tahun untuk menginformasikan bagaimana alokasi dana berjalan kepada masyarakat. Desa Wancimekar merupakan desa yang sudah melakukan atau memberikan dana-dana desanya dengan transparan yang dikirimkan di forum komunikasi desa. Ada juga penyusunan dokumen RKPDes yang dihasilkan dari musyawarah dusun. Dimana pemerintah desa juga mengambil aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada tahun 2022 perangkat desa Wancimekar melakukan sosialisasi APBDes maupun anggaran desa yang sudah dianggarkan dan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di RW setempat, sebagai bukti transparansi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Wancimekar. Jadi desa ini sudah sangat transparan dalam penggunaan anggaran desa dan faktor yang mempengaruhi kesiapan pengembangan smart village bagi desa Wancimekar adalah faktor pola pikir masyarakatnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Maka dengan adanya penelitian berdasarkan Analisis kesiapan pemerintah desa Wancimekar menuju konsep *Smart Village*, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Wancimekar sudah mulai siap untuk menerapkan konsep smart village baik mengembangkan dan mengimplementasikan setiap elemennya. Hal ini dibuktikan dalam elemen *smart governance*, Desa Wancimekar sudah mulai melakukan tahap awal dikembangkannya aplikasi maupun lama resmi tentang profile desa yang didalamnya juga berisi layanan untuk kebutuhan desa, data-data desa, serta fitur pelayanan masyarakat maupun surat menyurat pemerintahan desa. Walaupun program ini baru seumur jagung, namun langkah ini merupakan salah satu poin dan bukti penting kesiapan Pemerintah desa Wancimekar menjalankan konsep *Smart village* dan mewujudkan desa yang cakap digital. Selanjutnya dalam mengembangkan elemen *smart environment* dan *smart economy*, dalam proses untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang aktif berpartisipasi, pemerintah desa telah melakukan banyak sosialisasi untuk setiap sektor, seperti kesehatan dan bantuan sosial. Di dalam elemen *smart economy*, Pemerintah desa Wancimekar sudah dinilai sukses dalam menjalankan transparansi keuangan desa, dibentuknya BUMDes serta pengembangan proses surat menyurat UMKM.

SARAN

Adapun saran yang kami ingin sampaikan dalam penelitian ini adalah, kami merekomendasikan bagi Pemerintah desa Wancimekar beberapa poin. Pertama, dalam elemen *Smart Government*, sudah saatnya pemerintah desa lebih berfokus dalam membangun pelayanan digital, dikarenakan pelayanan melalui kantor desa sudah sangat mumpuni, untuk mewujudkan suksesnya program ini bisa dilakukan dengan memberikan staf desa Wancimekar pelatihan dan studi banding ke desa-desa yang sudah terlebih dulu menerapkan desa yang cakap digital. Walaupun dinilai sudah siap menuju konsep smart village, namun desa ini hanya baru tahap awal sehingga harus adanya langkah konkrit. Kedua, dalam elemen *Smart Economy*, Pemerintah desa harus benar-benar bisa memajukan BUMDes-nya terlebih lagi dengan banyak infrastruktur fisik desa yang luas dan besar, hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi ekonomi serta berjalannya UMKM desa. Meskipun desa Wancimekar baru memulai proses perkembangannya menuju Smart village, maka program-

program digitalisasi harus bisa segera direalisasikan dan tidak berhenti di tengah jalan kemudian menjadi program yang gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4
- [2] A. A. Aziiza and T. D. Susanto, "The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)," IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 722, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/722/1/012011
- [3] Ananda H, &, Ary Setyo W. (2023). ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPONEN SMART VILLAGE DI DESA LIMPUNG Vol. 5 No. 1: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik.
- [4] D. Perencanaan, F. Teknik, U. Diponegoro, J. P. Soedarto, and S. H. Tembalang, "Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village Implementation of Smart Governance Based on Smart," vol. 21, no. 2, pp. 145–160, 2020.
- [5] Dian Herdiana, 2019. Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages) Vol. 21 No. 1: JURNAL IPTEK-KOM (JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI).
- [6] Fahrina, A. (2022). Analisis Kesiapan Pembangunan Smart City Daerah Studi Kasus: Kabupaten Temanggung. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi), 9(2), 984–995.
- [7] H. A. Huda, U. Suwaryo, and N. I. Sagita, "PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)," J. MODERAT, vol. 6, no. 3, pp. 539–556, 2020.
- [8] Hikmah Nuraini, Endang Larasati, Sri Suwitri, Hari Susanta Nugraha, 2021. Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19. Vol 6, No 4
- [9] Nur Hadian, & Susanto, T. D. (2022). Pengembangan Model Smart Village Indonesia: Systematic Literature Review. Journal of Information System,Graphics, Hospitality and Technology, 4(2), 77–85.
- [10] Rini Rachmawati, "Pengembangan Smart Village untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency," J. Sist. Cerdas, vol. 1, no. 2, pp. 12–19, 2018, doi: 10.37396/jsc.v1i2.9.